

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Tiongkok adalah salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki sejarah panjang. Semua itu dimulai saat Tiongkok sendiri masih berbentuk kekaisaran, Hubungan antara Indonesia dan Tiongkok sudah dimulai sejak dahulu kala, Tiongkok dan Indonesia sendiri berinteraksi antara satu sama lain dimulai dari abad awal abad ke-15.

Saat Indonesia merdeka, Indonesia sebagai sebuah negara baru mendirikan banyak hubungan bilateral dengan negara lain dan Tiongkok adalah salah satu negara sahabat awal pada kemerdekaan Indonesia dan ini dimulai pada tahun 1950.

Indonesia adalah salah satu mitra bagi Tiongkok. Tiongkok sendiri kita ketahui sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia, dan Tiongkok mememanfaatkannya dengan baik, sebagaimana kita ketahui, banyak penduduk artinya banyak tenaga kerja. Dengan pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan banyak industri serta pabrik-pabrik untuk dibangun. Banyak proposal yang diajukan ke Tiongkok dan salah satunya adalah apa yang menjadi ACFTA atau ASEAN-Tiongkok Free Trading Area.

Free Trading Area ini membuka jalan untuk memudahkan perdagangan antara negara ASEAN dan Tiongkok. Sebelum adanya ACFTA ini, banyak yang meragukannya, seperti misalnya pemerintah Indonesia khawatir akan banyak produk murah Tiongkok yang membanjiri pasar Indonesia, dan bisa memberi dampak buruk pada kompetisi dan industri, atau tenaga kerja dari Tiongkok yang mungkin bisa mengalahkan kualitas tenaga kerja Indonesia.

Kerjasama lainnya antara Indonesia dan Tiongkok adalah *Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership between the People's Republic of Tiongkok and The Republic of Indonesia*. Kerjasama ini dibentuk pada 26 Maret 2015 pada konferensi Boao Forum for Asia (BFA) oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok ini membuka peluang bagi Indonesia agar investasi dan bantuan dana dari Tiongkok mudah masuk.

Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership between the People's Republic of Tiongkok and The Republic of Indonesia. Merupakan kerjasama yang dibentuk atas kesepakatan presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Indonesia Joko Widodo, *Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership between the People's Republic of Tiongkok and The Republic of Indonesia* meliputi bidang yang sangat luas, yaitu keamanan, politik, pertahanan, perdagangan, investasi, pertumbuhan ekonomi, maritim, ilmu penerbangan, sains, teknologi, budaya, urusan internasional, dan urusan regional.

Kedua Presiden menyatakan kepuasan mereka dengan pengembangan hubungan bilateral, menekankan bahwa sejak pembentukan *Strategic Partnership* yang komprehensif, kedua negara telah memperdalam kepercayaan timbal balik politik, mendapat keuntungan dalam kerja sama praktis, dan memperkuat pertukaran antar masyarakat dan budaya. Pendalaman hubungan Tiongkok-Indonesia yang berkesinambungan melayani kepentingan bersama masyarakat kedua negara, dan memberikan kontribusi besar bagi perdamaian dan stabilitas regional serta perkembangan dunia dan kemakmuran. Kedua belah pihak harus melakukan upaya bersama untuk menyoroti fitur khas dari *Strategic Partnership* yang komprehensif, yaitu kesetaraan kedaulatan, saling menghormati, saling percaya, saling menguntungkan, timbal balik, persatuan, dan koordinasi, di era baru.

Kedua Presiden berpendapat bahwa Tiongkok dan Indonesia memiliki minat yang luas dalam arena regional dan multilateral. Sebagai mitra penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas regional, mempromosikan kemakmuran dunia dan pembangunan, memajukan kerja sama *South-South*, dan menangani masalah-masalah global, kedua negara harus memperkuat komunikasi dan koordinasi strategis.

Khususnya dalam bidang infrastruktur, kedua belah pihak sepakat untuk memperdalam kerjasama infrastruktur dan industri, mendorong perusahaan-perusahaan dari kedua negara untuk melakukan pertukaran dan kerja sama di bidang-bidang yang disebutkan di atas seperti kereta api, jalan, pelabuhan, dermaga, bandara, tenaga listrik, tenaga surya, baja, bahan logam *non ferrous*, pembuatan kapal dan bahan bangunan. Kedua belah pihak sepakat untuk menjaga

komunikasi yang erat tentang pengembangan Zona Khusus Ekonomi Bitung dan proyek-proyek lainnya, dan mengeksplorasi cara dan metode khusus untuk melakukan kerja sama. Kedua belah pihak menyambut baik penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Infrastruktur dan Kerjasama Industri dan Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung antara Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Republik Rakyat Tiongkok dan Kementerian Negara- Badan Usaha milik Republik Indonesia.

Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership antara Indonesia dan Tiongkok merupakan sebuah peluang bagi Indonesia untuk bisa berkembang melalui bantuan dari negara Tiongkok, terutama bagi Indonesia yang mengalami kendala dalam bidang tenaga ahli dan biaya untuk melakukan pembangunan infrastruktur.

Bantuan yang dilakukan oleh Tiongkok dalam pembiayaan 3 proyek tol di Indonesia merupakan suatu bentuk implementasi yang dilakukan setelah diresmikannya kerjasama *joint statement on strengthening comprehensive strategic partnership* pada tahun 2015. Selain itu, kerjasama dan bantuan yang diberikan oleh RRT ke Indonesia merupakan salah satu contoh dari *Foreign Direct Investments* (FDI) yang merupakan suatu bentuk dari hubungan bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan Tiongkok. Anggaran yang dibutuhkan Indonesia untuk pembangunan infrastruktur tahun 2015-2019 sebesar Rp. 4.700 triliun (Bappenas, 2015). Pemerintah Indonesia tidak dapat membiayai seluruh pembangunan infrastruktur, oleh sebab itu Indonesia membutuhkan investasi asing untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Tiongkok dengan program Belt and Road Initiative yang akan memberikan dana bantuan investasi pembangunan infrastruktur, tentunya sangat menarik perhatian Indonesia.

Setiap dalam berhubungan antara satu sama lain pasti ada kepentingan yang didahulukan di dalamnya , begitu juga dengan hubungan bernegara pasti ada kepentingan nasional yang ingin dicapai dan di dahulukan dalam hubungan tersebut. Seperti dalam hubungan antara Indonesia-Tiongkok, Tiongkok tidak mungkin secara Cuma-cuma memberikan bantuan pembiayaan infrastruktur maupun tenaga ahli kepada Indonesia tanpa mendapat sesuatu sebagai balasannya. Bantuan yang diberikan Tiongkok ke Indonesia juga mempermudah Tiongkok

untuk amsuk ke pasar Indonesia dan mengetahui keadaan *Internal* ekonomi Indonesia itu sendiri, selain itu Tiongkok juga dapat melihat kondisi geografis negara Indonesia dalam membantu pembangunan proyek Infrastrukturnya.

Selain itu, setelah penandatanganan kerjasama joint statement antara Indonesia dan Tiongkok, Indonesia melakukan banyak revisi dalam peraturan maupun kebijakan, dan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah seperti “melonggarkan” atau mempermudah masuknya investasi, seperti peraturan tentang penyediaan tanah yang direvisi cakupan proyeknya dan bentuk santunannya untuk mengurangi penolakan masyarakat dalam proses pengadaan tanah, selain itu juga bermunculan paket ekonomi untuk mendorong masuknya investasi dan mendorong pembangunan infrastruktur serta memanjakan para investor seperti Perluasan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday); (2) Relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI); (3) Peningkatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Hasil Sumber Daya Alam.

